Suara PERMAMPU

"Perempuan Sumatra Otonom Atas Tubuhnya, Sehat & Kreatif "

Newsletter Suara PERMAMPU Edisi I—1 Juli 2015

- Akuntabilitas
- FKPAR
- Diskusi Kritis FMS
- Cerita Perubahan
- Permampu dalam Berita













Menyampaikan Inisiatif Perempuan Akar Rumput kepada Para Pihak untuk

Melihat dan menangkap pembelajaran dan cerita-cerita keberhasilan yang terjadi pada perempuan akar rumput menjadi hal penting dalam perjalanan Program Advokasi HKSR perempuan PERMAMPU melalui penguatan kepemimpinan perempuan pada enam bulan pertama di tahun 2015 di Sumatera.

Keberhasilan dan perubahan kecil tersebut merupakan inisiatif yang sudah dimulai dan akan terus ditularkan pada sesama perempuan, khususnya pada para pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten/kota. Keberhasilan kecil itu telah mulai dicapai, seperti mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam pemenuhan kebutuhan akan gizi, mengurangi tindakan aborsi yang tidak aman, mengembangkan pengetahuan lokal akan perawatan kandungan dan persalinan. Sementara itu, yang paling mendasar adalah cerita perubahan untuk membangun kekuatan ekonomi keluarga dan kelompok perempuan akar rumput serta mengembangkan beragam bentuk solidaritas sesama masyarakat miskin.

Akuntabilitas PERMAMPU sebagai sebuah organisasi kepada penerima manfaat utama yaitu perempuan akar rumput dan para pihak menjadi landasan untuk saling percaya dan terbuka. PERMAMPU mengedepankan keterbukaan dan keterkaitan antar *stakeholders* untuk saling menguatkan dan mendukung dalam mengurai isu kemiskinan yang berdampak pada pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) perempuan di pedesaan dan miskin kota. Hubungan antar *multi- stakeholder* juga diharapkan sebagai media belajar bersama, menemukan cara dan metode baru dalam memperbaiki layanan dan mengurangi kemiskinan perempuan dalam aspek pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Sekaligus membuka pemahaman dan cara pandang yang komprehensif dalam membuat kebijakan pelayanan HKSR sesuai konteks lokal dengan pendekatan berbasis hak perempuan.

Cerita atau inisiatif perubahan di akar rumput yang dikemas dalam dialog-dialog kebijakan secara perlahan tentunya akan menjadi perhatian *stakeholders* untuk menerimanya masuk dalam agenda program pembangunan daerah setempat yang bersifat permanen. Hal yang berharga dari pemikiran dan tindakan perempuan akar rumput di delapan propinsi di Sumatera dan sudah dimulai ini, akan terus bergerak agar roda kehidupan perempuan lebih sejahtera dan berkeadilan. (**Tety S dan Dina Lt)**

== Daftar Isi ==

I. Salam redaksi .....

II. Akuntabilitas Capaian Program HKSR Permampu Januari – Juli .....

III. FKPAR (Forum Komunitas Akar Rumput Untuk Perlindungan HKSR Perempuan) .....

- Provinsi Lampung .....
- Provinsi Sumatera barat .....
- Provinsi Bengkulu .....
- Provinsi Sumatera Utara .....
- Provinsi Sumatera Selatan .....
- Provinsi Riau .....
- Provinsi Aceh .....
- Provinsi Jambi .....
- Forum Komunitas Akar Rumput Pulau Sumatera .....

IV. Diskusi Kritis FMS .....

V. Cerita Perubahan .....

VI. Permampu dalam Berita .....

Dewan Redaksi

Penanggungjawab	:	Tety Sumeri
Sekretaris Redaksi	:	Sustri Saragih
Editor Tulisan	:	Dina Lumbantobing, Tety Sumeri
Editor Foto	:	Ronal Alexander Tampubolon
Kontributor	:	Direktur Eksekutif Koord. Program/Staf Lapang Lembaga Anggota Permampu
Design & Layout	:	Ronal Alexander Tampubolon
Distribusi	:	Ronal Alexander Tampubolon

Konsorsium Permampu

Jl.Letjen. Jamin Ginting KM 8 No.282 P. Bulan Medan 20141 Sumatera Utara Telp/Fax. 061-8361102



== Salam Redaksi ==

PERMAMPU (Perempuan Sumatra Mampu) adalah sebuah konsorsium yang berjuang untuk menguatkan kepemimpinan perempuan akar rumput, agar dapat menikmati dan memperoleh perlindungan serta pemenuhan Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi (HKSR) perempuan. Didirikan di Medan pada 27 November 2012 dengan anggota 8 (delapan) ORNOP/LSM Perempuan di Pulau Sumatera meliputi: Flower Aceh - Aceh, PESADA - SUMUT, LP2M - SUMBAR, PPSW Sumatera - Riau, APM - Jambi, WCC Palembang - SUMSEL, Cahaya Perempuan WCC - Bengkulu dan DAMAR - Lampung.

Newsletter adalah salah satu media publikasi yang dipilih PERMAMPU untuk menyajikan berbagai aktivitas untuk meningkatkan ketersediaan , keterjangkauan dan kualitas layanan HKSR perempuan; serta mengubah pendekatan dari berbasis kewajiban warganegara/perempuan kepada pendekatan berbasis kewajiban Negara berasas hak perempuan.

Edisi perdana ini akan menyajikan capaian program PERMAMPU dalam rangka perlindungan & pemenuhan HKSR perempuan (ini bisa dihilangkan) di 8 (delapan) propinsi wilayah kerjanya selama semester pertama tahun 2015. Demikian juga berbagai Inisiatif baru yang muncul bersama perempuan akar rumput dampingan lembaga anggota mengenai HKSR untuk publikasi dan perubahan akses pelayanan Kespro perempuan di tingkat desa sampai kabupaten. Membangun sinergi, memahami kebijakan dan peraturan pemerintah daerah dan stakeholders/para pihak berkaitan dengan pemenuhan HKSR perempuan melalui forum *multi stakeholders* dan diskusi kritis secara periodik di tingkat Kota/Kabupaten, bahkan di pedesaan/kelurahan.

Kami berharap, kehadiran Newsletter ini dan segenap informasi yang disajikan bermanfaat dan dapat menguatkan pemahaman pembaca atas perjuangan bahwa perempuan otonom atas tubuhnya, sehat dan kreatif.

Selamat membaca!

Tety Sumeri

Akuntabilitas

Capaian Program HKSR Permampu Januari – Juli 2015

Permampu sebagai sebuah konsorsium bersama anggotanya yaitu ONRNOP/LSM Perempuan di 8 (delapan) propinsi di Pulau Sumatera (Aceh, SUMUT, SUMBAR, Riau, Jambi, SUMSEL, Bengkulu dan Lampung) Program MAMPU ; melaksanakan program untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dalam akses pelayanan kesehatan oleh Program MAMPU ; melaksanakan program untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dalam akses pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi yang lebih baik.

Tujuan & Cakupan Program

Perempuan pedesaan, perempuan miskin dan perempuan muda di 29 Kabupaten di pulau Sumatera; diharapkan bisa menikmati, dihormati, dilindungi Hak-hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) mereka. Itulah tujuan dari Program yang disusun oleh delapan ORNOP/LSM Perempuan di akhir tahun 2014.

8 Lembaga Perempuan (Flower Aceh, Pesada, LP2m, PPSW, APM, Cahaya Perempuan, WCC, Damar

Program ini didasarkan oleh pengalaman penguatan perempuan dalam berbagai bentuk di Sumatera selama bertahun-tahun, serta penelitian mengenai Kehamilan yang Tidak Diinginkan di delapan propinsi (Aceh, SUMUT, SUMBAR, Riau, Jambi, Bengkulu, SUMSEL, dan Lampung) tersebut di awal s/d pertengahan 2014 yang lalu.

Manajemen Permampu

Meski baru enam bulan berjalan, Permampu telah mulai meletakkan dasar-dasar yang cukup kuat untuk berjalannya program ini, sebagaimana dapat dilihat dari artikel-artikel yang dimuat dalam nomor perdana ini. Konsorsium sebagai sebuah organisasi telah mempunyai perangkat yang cukup untuk melaksanakan program yaitu:

a. **Tim Kerja** yang terdiri dari: Dina Lumbantobing (Koordinator - PESADA), Desy Setiawaty (Anggota – Flower Aceh), Arteti Sumeri (Anggota – Cahaya Perempuan WCC Bengkulu).
b. **Host,** yaitu lembaga yang khusus mengurus manajemen & keuangan Konsorsium telah berjalan baik, yaitu: PESADA.
c. **SOP** sebagai pegangan operasional pelaksanaan program telah tersusun dan digunakan.
d. **Pedoman Perilaku** yang berisi nilai-nilai yang dianut oleh Permampu dalam pelaksanaan program
e. **Rencana Kerja** yang realistis untuk dilaksanakan, serta dimonitor dan dievaluasi secara teratur.
f. **Monitoring dan Rapat Berkala** terlaksana setiap triwulan.

Program Mulai Dikenal & Berjaringan

Program ini telah diluncurkan dalam arti diperkenalkan secara resmi di 8 wilayah dampingan anggota Konsorsium PERMAMPU dan melaksanakan secara serentak Perayaan Hari Perempuan Internasional dengan melibatkan perempuan akar rumput dan para stakeholders yang berkaitan dengan keberhasilan program PERMAMPU.



Peringatan Hari Perempuan Internasional Maret 2015—Cahaya

Untuk terbangunnya hubungan antara perempuan yang didampingi, telah terbentuk Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput di delapan Propinsi dan di pulau Sumatera. Anggota dari Forum berjumlah 37.655 perempuan akar rumput yang merupakan dampingan dari 23 ORNOP/LSM serta ORMAS Perempuan mitra MAMPU di Sumatera.

Selain itu, untuk menguatkan jaringan advokasi, telah terbentuk Forum Multistakeholder di 15 Kabupaten di wilayah programnya sbb:

- Aceh : 3 Kab/Kota (Kota Banda Aceh, Pidie, Aceh Utara)
- SUMUT : 7Kab/Kota (Dairi, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Langkat, Nias, Nias Barat)
- SUMBAR : 1 Kab/Kota (Kota Padang)
- Jambi : 1 Kab/Kota (Merangin)
- Bengkulu : 2 Kab/Kota (Kota Bengkulu, Rejang Lebong)
- Lampung : 1 Kab/Kota (Lampung Utara)

Di Bengkulu, terbit dua edisi media "Lentera Perempuan" yang menyuarakan isu HKSR yang didistribusikan di Kantor Desa, Puskemas Kecamatan Selupu Rejang, Desa Sumber Urip serta warung-warung manisan di Desa Sumber Urip; sementara di Lampung, media meliput berbagai kegiatan Damar di Koran local.

Nama kelompok	**# kelompok perempuan yang dibentuk dalam periode pelaporan**	**# anggota**	
		# perempuan	# laki-laki
Kelompok Perempuan Muda	49 kelompok	934	376
Kelompok Perempuan yang dikembangkan (kelompok yang telah ada dan diperkuat)	141 kelompok	3.579	34
Kelompok perempuan basis di pedesaan dan miskin kota	5 kelompok	224	-
PIK-R dan kelompok perempuan muda di sekolah	8 kelompok	134	106



Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput Pulau Sumatera, 14-16 Mei 2015—Padang

TANTANGAN

- **Dua lembaga mengalami tantangan secara operasional, baik karena dipertanyakan izin operasional lembaga (LP2M) maupun isu aliran sesat (Flower Aceh).**
- Reaksi keras dari tokoh agama atas PP no. 61 tahun 2014, khususnya tentang pengecualian untuk aborsi.
- Penolakan pihak penyedia layanan bekerja sama dengan Pembatra
- Mengelola kerjasama antar NGO di lapang, untuk menghindari kesan *double identity*, wilayah yang berimpit.
- Mendidik staf WCC untuk pengorganisasian yang tidak berbasis penguatan ekonomi. Sementara itu, masih ada anggota kelompok yang belum yakin bahwa usaha simpan pinjam yang bermodalkan dari anggota saja akan memperkuat ekonomi kelompok. ■ **(Dina Lt & Tety S)**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERMAMPU PADA SEMESTER I TAHUN 2015

Sumber Dana PERMAMPU:			
Hibah Program PERMAMPU		**10,101,579,911.57**	
Bunga Bank -- PERMAMPU		**22,511,386.00**	
Total Pengeluaran :		**10,124,091,297.57**	
-			
Penjelasan	**Budget**	**Realisasi Capaian**	**Capaian Semester 1 2015**
I. Manajemen -- PERMAMPU			
1.1 Honorarium -- PERMAMPU	459,000,000.00	389,047,500.00	84.76
1.2 Operasional Kantor -- PERMAMPU	86,000,000.00	67,317,616.00	78.28
1.3 *Procurement -- PERMAMPU*	31,000,000.00	36,265,000.00	116.98
II. Program -- PERMAMPU			
2.1 Review enam bulanan (2 per lembaga)	158,700,000.00		0.00
2.2 Rapat koordinasi para Direktur	65,600,000.00	28,267,500.00	43.09
2.3 *Capacity building untuk anggota (2 lembaga)*	140,000,000.00	50,755,400.00	36.25
2.4 Pertemuan jaringan nasional dan internasional	47,600,000.00	8,664,600.00	18.20
2.5 Monitoring 3 bulanan ke lembaga anggota (2 lembaga)	112,000,000.00	35,475,000.00	31.67
2.6 Training audit partisipatif	25,200,000.00		0.00
2.7 *Collective action*	550,000,000.00	277,516,850.00	50.46
III. Kegiatan Lembaga Anggota PERMAMPU			
3.1 Pengorganisasian	2,676,765,000.00	2,202,242,170.00	82.27
3.2 Inovasi	133,500,000.00	16,033,200.00	12.01
3.3 Advokasi masyarakat adat	212,605,000.00	199,956,400.00	94.05
3.4 Advokasi negara	429,905,000.00	207,921,175.00	48.36
3.5 Advokasi institusi pendidikan	358,508,750.00	155,147,000.00	43.28
3.6 Advokasi institusi agama dan tokoh agama	319,480,000.00	164,777,100.00	51.58
3.7 *Networking & learning*	272,155,000.00	375,858,425.00	138.10
3.8 *Capacity building & knowledge management*	447,205,000.00	477,895,167.00	106.86
3.9 Monitoring dan Evaluasi	285,780,000.00	164,236,500.00	57.47
3.10 Manajemen & Operasional Lembaga Anggota			
3.10.1 Honorarium	837,150,000.00	821,075,854.00	98.08
3.10.2 Operasional Kantor	367,322,000.00	324,970,538.00	88.47
3.10.3. *Procurement*	253,000,000.00	352,173,050.00	139.20
3.11. *Corefund*	1,059,535,744.00	715,238,380.00	67.50
Pajak bank	-	4,502,277.00	100.00
Administrasi bank			
Total	**9,328,011,494**	**7,075,336,702**	**75.85**

FKPAR

Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput untuk Perlindungan HKSR Perempuan di Pulau Sumatera

Provinsi Aceh



Lokakarya Pembentukan Forum Perempuan Akar Rumput Provinsi Aceh telah berhasil mengidentifikasi kondisi perempuan di Aceh antara lain:

1. Budaya patriarkhis yang masih berkembang dan mempengaruhi cara berfikir masyarakat di Aceh
2. Rendahnya alokasi anggaran dan program untuk pemberdayaan perempuan (tidak mencapai 5%).
3. Masih adanya kebijakan pemerintah yang justru mendiskriminasikan perempuan.
4. AngkaKTP dan KDRT tinggi, dan banyak kasus yang sulit terungkap, bahkan korban seringkali dikriminalkan.
5. Akses perempuan terhadap informasi dan pendidikan masih rendah.
6. Akses perempuan terhadap jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintahan minim.
7. Partisipasi perempuan di legislatif rendah (11%); DPRA 2 orang dan DPRK 50 orang).
8. Pelibatan perempuan dalam forum musyawarah dan forum pengambilan kebijakan masih sangat rendah (tingkat Desa sampai Provinsi).
9. Tingginya angka perempuan yang menikah sirih dan menikah di usia dini.

Adapun tujuan dari forum ini adalah:

- Memperkuat organisasi kelompok perempuan di tingkat komunitas untuk melahirkan kader-kader perempuan potensial,
- Mempengaruhi kebijakan dan anggaran yang memihak pada perempuan,
- Memperkuat gerakan perempuan akar rumput agar menjadi kekuatan besar.

Forum ini diharapkan dapat menjadi pusat informasi tentang isu-isu hak perempuan, ruang untuk belajar dan peningkatan kapasitas bagi perempuan akar rumput, tempat untuk bermusyawarah tentang hak-hak perempuan, tempat pemulihan kader-kader perempuan akar rumput, tempat refleksi gerakan perempuan akar rumput, dan forum advokasi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan**.** Pengalaman keberhasilan perempuan Aceh dalam melakukan advokasi pemenuhan Hak Asasi Perempuan (HAP):

1. Adanya kebijakan dan anggaran yang memihak kepada perempuan.
2. Inisiasi MoUlegalitasidentitashukum, IsbatNikah, bukunikah, aktakelahiranbagimasyarakatkurangmampu.
3. Advokasi pelayanan kesehatan maksimal di unit pelayanan kesehatan.
4. Adanya Forum Multistakeholder di Kabupaten/Kota untuk mendiskusikan isu-isu seputar kesehatan reproduksi perempuan dan strategi pemenuhannya.
5. Menjadai pusat pengaduan untuk perempuan korban di daerah Lhokseumawe dan Aceh Utara.
6. Juara I tingkat Nasional P2WKSS (Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera).
7. Adanya forum dialog perempuan di tingkat Kabupaten/ Kota.

Provinsi Sumatera Utara



Terbentuknya Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput Sumatera Utara, merupakan wadah bersama dari perempuan akar rumput dampingan mitra MAMPU SUMUT, akan melakukan gerakan bersama terkait isu – isu strategis di wilayah/kabupaten masing – masing.Adapun yang menjadi visi forum ini adalah mandiri, sejahtera, dan berkeadilan gender. Misi forum ini adalah:

1. Pendidikan dan kesadaran kritis.
2. Advokasi kebijakan.
3. Membangun hubungan dengan tokoh adat dan tokoh agama.
4. Membangun hubungan pemangku kepentingan.

Melalui forum ini diharapkandapattercapai:

1. Pemahaman yang sama program MAMPU di SUMUT khususnya tingkat akar rumput.
2. Membangun gerakan perempuan akar rumput dampingan Mitra MAMPU di SUMUT.
3. Bertambahnya pengetahuan tentang kepemimpinan perempuan akar rumput.
4. Terbentuk Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput mitra MAMPU di SUMUT.

Provinsi Sumatera Barat



Adapun anggota organisasi yang datang adalah dari lembaga KPI SUMBAR, LP2M, Nurani Perempuan WCC, Pambangkik Batang Tarandam, dan Pekka. Kegiatan yang dilakukan pada saat itu adalah perkenalan antar lembaga, menyepakati model/bentuk dan tujuan Forum Komunitas, menyepakati peran dan tanggung jawab masing-masing mitra MAMPU, dan menyepakati nilai/prinsip kerja sama dalam membangun dan memperkuat Forum Komunitas.

Rapat kedua yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2015 dengan agenda membahas persiapan untuk acara Forum MAMPU untuk akar rumput dan membahas kepanitian.Rapat ketiga diselenggarakan pada tanggal 04 Mei 2015. Dalam agenda tersebut diputuskan bahwa forum akan dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 Juni, tempat pelaksanaan, peserta yang akan diundang, dan teknis pelaksanaan.

Kegiatan Lokakarya dan Peluncuran Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput Sumatera Barat dilakukan dengan melibatkan 68 orang mewakili dari perempuan akar rumput, staf pendamping, direktur dari lembaga-lembaga mitra Program MAMPU di Sumatera Barat yakni LP2M, KPI SUMBAR, Pekka, Pambangkik Batang Tarandam (PBT), dan Nurani Perempuan WCC.

Provinsi Riau



Forum ini terlaksana pada tanggal 20-21 April 2015. Awalnya sudah ada kelompok yang terbentuk tetapi hilang muncul dan setelah ada pendampingan kelompok tersebut semakin kuat. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan di provinsi Riau adalah:

1. Angka KTP dan KDRT tinggi, karena korban sulit untuk mengungkapkan kasusnya.
2. Perempuan jarang dilibatkan didalam MUSREMBANG dari tingkat desa sampai ketingkat yang lebih tinggi.
3. Masih banyak anak remaja yang putus sekolah.
4. Kurangnya akses perempuan dalam memperoleh dana -dana yang ada di desa.
5. Beban ganda perempuan karena pembagian peran yang tidak seimbang antara suami dan istri.
6. Pernikahan dini yang dikarenakan persoalan ekonomi.
7. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi kurang.
8. Rendahnya pendidikan dan SDM perempuan.
9. Budaya patriakhi yang masih tinggi.
10. Upah kerja laki-laki dan perempuan dibedakan, laki-laki lebih tinggi sedangkan perempuan rendah.

Hal ini menjadi pendorong terbentuknya forum bersama untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi olehp perempuan. Adapun yang menjadi visi forum ini yaitu memajukan kepemimpinan perempuan melalui pendidikan untuk memperoleh Hak Asasi Perempuan, agar mencapai kesetaraan gender, aktif, dan kreatif untuk menggali potensi dari dan peduli sosial. Tujuanutama Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput Provinsi Riau adalah pemberdayaan perempuan melalui 5 fokus isu yaitu,kepemimpinan perempuan di bidang ekonomi, kesehatan reproduksi, pendidikan, penghapusan diskriminasi dan kesetaraan gender. Misi forum ini adalah:

1. Perempuan Indonesia bersatu, maju, mandiri sukses, beriman menjadi sehat jasmani dan rohani.
2. Penghapusan diskriminasi, bebas dari kekerasan seksual, fisik, psikologis, dan seksual.
3. Memajukan pendidikan perempuan agar mempunyai keterampilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

Nilai-nilai yang dikandung dalam forum ini adalah kesetaraan gender, pedulisosial, tanggungjawab, musyawarahdanbersatu, transparansi, demokrasi, dan beriman.

Provinsi Jambi



Lokakarya Pembentukan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput Propinsi Jambi berhasil menyatukan 1.120 perempuan yang berasal dari 30 Desa, 4 Kabupaten, dan 1 Kota Madya. Forum yang telah terbentuk ini telah menyepakati beberapa pokok agenda kegiatan yang akan dilakukan secara bersama-sama diantaranya adalah:

- Audiensi dengan Gubernur
- Proposal pendidik Pemilih
- Pembekalan pengurus forum
- Pendidikan pemilih dan pendamping tentang Pilkada, Kepemimpinan Perempuan, UU Desa, dan Pilkades
- Hari Kesehatan Seksual
- Pertemuan Pengurus

Provinsi Sumatera Selatan



Perempuan akar rumput dampingan Mitra Mampu menyadari pentingnya kekuatan kolektif akar rumput dan membentuk Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput Propinsi Sumatera Selatan. Forum Komunitas terbentuk pada tanggal 21 – 23 April 2015, karena baru terbentuk kerja nyata komunitas ini masih belum terlihat. Adapun yang menjadi tujuan forum ini adalah melakukan penguatan kepemimpinan perempuan akar rumput untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender mulai dari desa dan nasional. Prinsip-prinsip forum ini adalah musyawarah, menghargai, tidak membedakan satu sama lain, saling menguatkan, dan saling belajar. Di forum ini juga diputuskan struktur forum yaitu rapat anggota, kemudian badan pengawas, dan tim koordinasi. Lembaga yang ada di SUMSEL ini adalah WCC dan Pekka. Kerja nyata yang diinginkan melakukan kampanye dan gerakan bersama pada saat hari peringatan perempuan.

Provinsi Bengkulu

Yang melatarbelakangi pembentukan Forum Perempuan Akar Rumput Provinsi Bengkulu adalah adanya perjuangan bersama untuk melepaskan perempuan dari ketidakadilan yang penting untuk dilakukan secara terus-menerus. Untuk membangun kesadaran pentingnya membangun gerakan perempuan yang lebih luas, maka Cahaya Perempuan WCC dan KPI Bengkulu menyelenggarakan Lokakarya Pembentukan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput Provinsi Bengkulu pada tanggal 8 Mei 2015 di Extra Hotel, Kota Bengkulu.

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip Forum Komunitas ini adalah berkeadilan gender, setara, solidaritas, berjejaring, dan mandiri. Forum ini bertujuan agar melalui forum ini terwujudlah forum gerakan perempuan akar rumput yang mampu mengadvokasi hak-hak perempuan sehingga terwujudnya berkeadilan gender sehingga bisa mandiri dan mampu memperluas jaringan kerja. Misi forum ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas advokasi Hak Asasi Perempuan
2. Memperkuat solidaritas komunitas perempuan akar rumput di Bengkulu
3. Meningkatkan pendidikan dan kesehatan perempuan akar rumput di Bengkulu
4. Membangun kemandirian komunitas perempuan akar rumput
5. Memperjuangkan kebijakan yang berkeadilan gender, dan
6. Memperluas jaringan kerja dengan semua organisasi se visi di tingkat Nasional.



Isu-isu strategis yang didiskusikan dalam forum ini adalah:

1. Rendahnya akses layanan informasi dan pelayanan Kespro yang terbatas bagi perempuan di desa dan miskin kota (terutama layanan yang murah/gratis).
2. Tidak optimalnya pelayanan kespro bagi remaja di PUSKESMAS.
3. Penerima manfaat perlindungan sosial (Raskin, PNPM, danBPJS) yang tidak tepat sasaran.
4. Kurang alokasi anggaran untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh PEMDA Kab/Kota.
5. PERDA adat yang diskriminitif terhadap perempuan.

Saat ini, Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput Propinsi Bengkulu telah memulai upaya untuk mempengaruhi kebijakan dengan menyampaikan aspirasi kepada DPRD Provinsi dan Pemda Provinsi Bengkulu.

Provinsi Lampung



Gerakan Perempuan Lampung merupakan Organisasi massa perempuan yang lahir dari *grass root*. Berproses sejak tahun 2001, melalui pendidikan-pendidikan kritis yang difasilitasi oleh Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR di berbagai wilayah pinggiran Lampung sehingga perempuan-perempuan "terdidik" yang berserak di beberapa kabupaten/kota merasakan kegelisahan yang sama untuk menyatukan diri agar memiliki kekuatan.

Melalui berbagai pertemuan, kegelisahan itu terus menjadi bahan diskusi sehingga lahir ide untuk membangun organisasi bersama yang bisa mempersatukan dan memperkuat posisi perempuan Lampung.Gagasan itu diwujudkan melalui Deklarasi Gerakan Perempuan Lampung, pada tanggal 8 Maret 2008, yang dihadiri 2000-an anggota dan calon anggota. Namun tak berhenti sampai disitu saja, proses tersebut dikukuhkan dengan Kongres Pertama Gerakan Perempuan Lampung, di Wisma Haji Bandar Lampung, pada tanggal 17-19 Oktober 2009. Kongres diikuti oleh 5 Serikat yakni, Serikat Perempuan Bandar Lampung (SPBL), Serikat Perempuan Lampung Selatan (SEPALAS), Forum Advokasi Kemanusiaan Lampung Tengah (FAK Lampung Tengah), Serikat Perempuan Lampung Timur (Perempuan Timur), dan FAKTA Tanggamus sebagai penguatan dan konsolidasi organisasi.

Secara formal Kongres Pertama Gerakan Perempuan Lampung menghasilkan : *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, *Garis Besar Haluan Organisasi*, *Rekomendasi yang disampaikan kepada DPRD dan Gubernur Lampung*, serta *Pemilihan Pengurus.* Kemudian menyusul pada 2010 pendirian Serikat Lampung Utara, yang diberi nama Kesatuan Perempuan Lampung Utara (Kepal Utara).

Kongres Kedua Gerakan Perempuan Lampung seharusnya dilaksanakan pada tahun 2012, namun baru

akan terselenggara saat ini, karena tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menyelenggarakan kongres. Namun Gerakan Perempuan Lampung terus melakukan upaya secara bersama-sama, terus menerus dan sistematis untuk memperjuangkan perubahan sosial menuju keadilan untuk semua serta untuk terselenggaranya Kongres Kedua Gerakan Perempuan Lampung.

Untuk itu, dalam rangka memperkuat dan mengkonsolidasikan kelembagaan Gerakan Perempuan Lampung, merumuskan *Garis Besar Haluan Organisasi*, serta merumuskan R*ekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintahan Daerah Propinsi Lampung, diselenggarakan Seminar dan Kongres Kedua dengan tema* ***"Percepatan Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Sebagai Hak Asasi Manusia"pada*** 5 - 7 Juni 2015. Selain 6 (enam) Serikat Perempuan di 6 kabupaten/kota, Kongres ini dihadiri pemerintah propinsi/kab/kota, Aparat Penegak Hukum, Media, Rumah Sakit, ORNOP/LSM, dan mahasiswa.

Sisi Lain Kongres Gerakan Perempuan Lampung :

- Dalam Sidang-sidang Komisi sudah dipimpin oleh perwakilan Serikat itu sendiri.
- Sudah terumuskan Program Kerja dan Rekomendasi yang akan disampaikan ke Pemerintah Daerah
- Saat Seminar dan Kongres II Gerakan Perempuan Lampung pula, BPJS memberikan layanan gratis pemeriksaan Kanker Serviks sepanjang acara.
- Dalam Seminar dan Kongres II Gerakan Perempuan Lampung bertema "Percepatan Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi sebagai HAM", di depan Pimpinan Komnas Perempuan Periode 2015-2019 Budi Wahyuni, Badan PP& PA berjanji akan mendukung inisisasi kebijakan lokal.
- Rumah Sakit Ibu Anak Santa Ana berjanji akan mendukung dalam setiap kegiatan kampanye HKSR.

Kegiatan Lokakarya dan Peluncuran Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Pulau Sumatera dilakukan pada 14-16 Mei 2015 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan 154 orang mewakili dari perempuan akar rumput, staf pendamping, direktur dari lembaga-lembaga mitra Program MAMPU di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Seluruh peserta, terutama perempuan akar rumput diberi kesempatan untuk saling berbagi pengalaman tentang tindakan kolektif yang telah dilakukan selama ini dalam upaya perjuangan Hak Asasi Perempuan (HAP) di masing-masing wilayahnya.

Visi

Terwujudnya gerakan perempuan akar rumput yang mandiri untuk mendorong kepemimpinan perempuan yang mampu melakukan advokasi dan pemenuhan hak-hak perempuan yang berkeadilan gender.

Misi

Mengembangkan ekonomi perempuan melalui keswadayaan
Pendidikan dan kesadaran kritis untuk perempuan
Mendorong perempuan untuk menjadi pemimpin dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan
Memperkuat jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan

Para peserta berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi serta menyusun kesepakatan bersama yang akan menjadi gerakan bersama oleh forum tersebut. Peluncuran Forum KPAR Sumatera dihadiri oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan PKBI Daerah Sumatera Barat, DPRD Komisi I Provinsi Sumatera Barat, SKPD terkait dan perwakilan LSM serta jurnalis di Sumatera



Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput Pulau Sumatera



Pengurus FKPAR Sumatera (Siti, Rusli dan Ega)

Adapun yang menjadi hasil pleno masalah dan akar masalah serta tugas forum dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Masalah	Akar masalah	Tugas Forum
Data Kemiskinan & BPJS tidak akurat	KKN, manipulasi data	Perempuan terlibat dalam pendataan keluarga miskin Perempuan melakukan pendataan agar memiliki bank data sebagai alat advokasi
Pendidikan Perempuan	Kemiskinan Adat/hukum adat	Paket A, B dan C untuk semua kelompok dampingan
Keterwakilan perempuan dalam semua tingkatan pengambilan keputusan di tingkat lokal	Kepercayaan dan dukungan tidak ada/minim Kesadaran politik perempuan lemah	Perempuan menjadi pemimpin: Desa (BPD, Kades, Kadus, Sekdes, Kaur) Kecamatan Kabupaten Terlibat dalam seluruh proses penyelenggara PEMILU, pilkada
Kesehatan reproduksi	Rendahnya pengetahuan tentang tubuh dan kespro Pelayanan dan fasilitas kesehatan perempuan kurang baik/buruk	Pendidikan mengenai HKSR (Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi) Advokasi ketersediaan bidan desa dan dokter kandungan terutama perempuan di tingkat kabupaten ke bawah

Table Hasil Fleno masalah dan akar masalah serta tugas forum

PROVINSI	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH DESA	JUMAH ANGGOTA
ACEH	15 KAB.	279 DESA	6.883
SUMATERA UTARA	19 KAB / KOTA	309 DESA	17.684
RIAU	1 KAB / KOTA	20 DESA	2.336
SUMATERA BARAT	15 KAB / KOTA	90 DESA/ NAGARI	3.970
JAMBI	6 KAB / KOTAMADYA	48 DESA	1.570
SUMATERA SELATAN	5 KAB	79 DESA	1.954
BENGKULU	7 KAB / KOTA	45 DESA	1.140
LAMPUNG	6 KAB / KOTA	90 DESA	2.118
Total	74 KAB / KOTA	960 DESA	37.655

Table Data Jumlah Kelompok Perempuan Dampingan di Pulau Sumatera

FMS (Forum Multi Stageholder)

Flower—Aceh



Pertemuan Forum *Multi-Stakeholder* Kota/Kabupaten dilaksanakan secara regular tiap bulannya di Aceh Utara, Banda Aceh dan Pidie. Kegiatan ini melibatkan pemangku kebijakan di institusi pemerintahan eksekutif yang meliputi SKPK terkait (Bappeda, Dinas Kesehatan, Kantor PPKB, Rumah Sakit, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, P2TP2A, Puskesmas dan Camat dari kecamatan Lueng Bata, Meuraxa, Sawang dan Kuta Makmur, perwakilan tokoh adat dan agama, Ornop/ LSM dan media. Forum ini disepakati sebagai Forum *Multi-Stakeholder* yang secara khusus untuk mendiskusikan tentang isu-isu HKSR, mulai dari melakukan identifikasi persoalannya, berbagi informasi tentang cara-cara penanganan persoalan terkait HKSR, sinergi program, menyusun dan melakukan advokasi bersama terkait pemenuhan HKSR di masing-masing wilayah.

PESADA – Sumatera Utara



Di wilayah dampingan PESADA, sudah terbentuk Forum Multi-Stakeholder (FMS) di 7 kabupaten di Sumatra Utara, yaitu Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Langkat, Nias dan Nias Barat.

Adapun proses pembentukannya:

1. Identifikasi masing-masing tokoh di setiap kabupaten (Tokoh Adat, Tokoh Agama, Bidan Desa, dan Pembatra).
2. FGD untuk setiap tokoh. Tindak lanjutnya ada diskusi regular untuk setiap tokoh (Forum Adat, Forum Agama, dan Pembatra).
3. Diskusi dan *lobby* dengan Dinas Kesehatan tentang program ini dan hubungannya dengan program Dinas Kesehatan setempat.
4. Pada Perayaan Hari Perempuan Internasional, melakukan dialog publik yang menghadirkan perwakilan para tokoh, kelompok perempuan, dan instansi terkait.
5. Setelah 2 kali diskusi regular di setiap forum tokoh, dilaksanakan Lokakarya Pembentukan Forum Multi-Stakeholder.
6. Kemudian dilaksanakan "Bedah PP. no.61 tahun 2014 untuk FMS".
7. Diskusi regular untuk penguatan FMS (Finalisasi struktur dan penentukan program kerja).

LP2M – Sumatera Barat



Pembentukan Forum *Multi-Stakeholder* di Kota Padang dilakukan dalam rangkaian kegiatan Lokakarya gender dan HKSR bagi multi pihak di Kota Padang pada tanggal 15-16 April 2015 di Hotel Axana, Kota Padang. Forum tersebut disepakati dengan nama "Forum Multi pihak Peduli HKSR Kota Padang". Anggota forum yang tergabung sementara ini masih aparatur pemerintahan dari level RT, kelurahan, kecamatan dan kota di Kota Padang. Peserta yang hadir antara lain:

(Continued on page 13)

1. Dinas Kesehatan Kota Padang.
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB Kota Padang, 3)
3. Bappeda Kota Padang, 4)
4. Anggota DPRD (Komisi IV yang mengkaji tentang Pemberdayaan Perempuan/Kesehatan) Kota Padang.
5. Pengadilan Tinggi Kota Padang.
6. Pengurus P2TP2A Kota Padang.
7. PKK Kota Padang.
8. RSUD Kota Padang.
9. PKBI Sumbar
10. Camat Kuranji
11. Camat Lubuk Kilangan
12. Petugas P2N Kecamatan Kuranji.
13. Petugas P2N Kecamatan Lubuk Kilangan
14. Lurah Kuranji
15. Lurah Batu Gadang
16. Ketua LPM Kelurahan Batu Gadang
17. Puskesmas (KIA dan Promkes) Kuranji
18. Puskesmas (KIA dan Promkes) Batu Gadang
19. Bidan Desa Kelurahan Kuranji
20. Ketua RW Wilayah Kelurahan Kuranji
21. Ketua RT Wilayah Kelurahan Kuranji
22. Ketua RT Wilayah Kelurahan Batu Gadang.

Lokakarya ini menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Ada peraturan tentang penjualan alat kontrasepsi
2. Situs-situs porno dari warnet ditutup
3. Adanya lembaga pemerintah untuk pelestarian pembinaan/penasehat perkawinan
4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang HKSR
5. Pemkot menyediakan dana untuk sosialisasi atau pembinaan calon pengantin

APM – Jambi

Diawali dengan pembentukan beberapa forum yaitu Forum Perempuan Akar Rumput, Kelompok PIK–R, Forum Tokoh Agama, Forum Tokoh Adat, Institusi Pendidikan dan Forum Suami. Setelah beberapa Forum *Stakeholders* mitra APM terbentuk, APM melakukan *hearing* dan *lobby* ke beberapa dinas/instansi terkait termasuk ke Bupati untuk proses pendekatan. Melalui metode ini diharapkan agar pemerintah bersedia memfasilitasi, baik tempat dan juga masalah kehadiran peserta dengan harapan agar bisa terlibat pada proses pembentukan FMS yang akan dilaksanakan.

Proses pelaksanakan pembentukan Forum *Multi-Stakeholder* yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2015 dan bertempat di Aula Kantor PKK Kab. Merangin adalah atas ijin dan rekomendasi dari pihak Pemda. Sedangkan untuk peserta pembentukan FMS, APM mengundang para ketua forum yang sudah terbentuk dengan tujuan agar para ketua forum bisa menyampaikan rekomendasi hasil kesepakatan bersama yang telah disusun dalam masing-masing forum. Selain para ketua Forum, APM juga



APM—Jambi

mengundang para instansi terkait diantaranya: BPPKB & PA, Dinkes, Diknas, Kesbangpol, Bappeda, UPPA Polres Bangko, Pengadilan Agama, Kemenag, TP PKK Kab. Merangin dan Dinas PMPD. Bupati Merangin, tidak dapat hadir dan diwakili oleh Bapak Sekda.

Cahaya Perempuan WCC – Provinsi Bengkulu



Cahaya Perempuan WCC—Provinsi Bengkulu

Di wilayah dampingan Cahaya Perempuan WCC telah terbentuk Forum Multi-Stakeholder di Kabupaten Rejang Lebong dan di Kota Bengkulu pada April 2015. Pada

(Continued on page 14)

pembentukan forum ini Walikota/Bupati diwakili oleh Sekda dan APH tidak bias hadir. Namun begitu forum tetap disepakati dan tetap dibentuk oleh Sekda setempat. Peserta yang hadir pada pertemuan tsb antara lain; Bappeda, Dinkes, Diknas, Dinso, BPPKB/BPMPKB, Kasubag Bantuan Hukum, Kabid Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, Tim PKK, Ketua Kelompok di wilayah dampingan Cahaya Perempuan WCC, BMA, Kandepag, Komisi I dan III DPRD Kota Bengkulu. Media.

Hasil pertemuan menyepakati antara lain:

1. Pentingya bertemuan secara periodic untuk bertukar informasi dan diskusi tentang persoalan HKSR yang terjadi.
2. Forum sebagai ruang untuk menyusun strategi advokasi anggaran karena sering anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD.
3. Format/ bentuk Forum, Fungsi dan Agenda kerja Forum.
4. Ada legalitas forum (Surat Keputusan) yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota minimal Sekda.
5. Mengkaji ulang RAPERDA Bantuan Hukum untuk Orang Miskin dan RAPERDA Pencegahan dan Penanganan Perempuan & Anak Korban Kekerasan di Kab. Rejang Lebong.
6. Implementasi Perda No 5 th 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan anak dari Kekerasam di Kota Bengkulu
7. Implementasi PERDA tentang Pendidikan di Kota Bengkulu (khususnya penerapan pasal 12 tentang siswi/ pelajar yang mengalami KTD dapat melanjutkan pendidikan formal di sekolah yang sama).
8. Menyepakati pertemuan ini selanjutnya ada ruang untuk Forum Multi-Stakeholder termasuk untuk kelompok-kelompok perempuan yang didampingi.

Cerita Perubahan

Ibu Rumah Tangga Menuju Kepala Desa



Dulu saya (Murni) hanya seorang ibu rumah tangga biasa, yang pada masa SMP nya bahkan minta tolong orang lain untuk membayarkan SPP karena tidak punya nyali. Tetapi setelah mendapat pendidikan dan pendampingan oleh DAMAR dan menjdi anggota Serikat Perempuan Lampung Selatan (SEPALAS), hidup saya berubah. Saya diminta untuk menjadi tim pelatih masyarakat di tingkat kecamatan dan pokja ekonomi kreatif.

Saat itu saya melihat ada anak yang mengalami bibir sumbing. Saya prihatin dan berpikir bagaimana caranya agar anak tersebut bisa di operasi dengan gratis. Akhirnya saya bertemu dengan Yayasan Citra di Korpri dan dari situ saya bisa melakukan sesuatu untuk membantu anak tersebut. Itu luar biasa menurut saya memberikan sesuatu yang orang lain butuh.

Pada saat pemilihan Gubernur, saya diminta oleh Fakultas FISIP Unila untuk melakukan survei keterwakilan masyarakat. Di desa, saya juga terpilih menjadi anggota Tim Verifikasi Dana Perguliran di PNPM. Tugas saya sebagai perguliran dana untuk usaha ekonomi menengah ke bawah. Sepalas baru-baru ini dapat bantuan alat senilai 15 juta, dapat bantuan mesin jahit dari PKBM Tunas Bangsa, dan salah satu kadernya menjadi koordinator pendiri PAUD. Tahun 2015 inim saya mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Mandah Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Strategi dan upaya yang dilakukan DAMAR dalam pemenangan saya sebagai Kepala Desa dengan cara:

1. Pemetaan wilayah di Desa Mandah dan mengidentifikasi pemilih potensial.
2. Melakukan survei elektabilitas Calon Kepala Desa untuk mengetahui seberapa besar masyarakat Desa Mandah mengenal saya dan calon lain serta harapan masyarakat terhadap calon lainnya.
3. Konsolidasi Dusun Potensial untuk memperkuat dukungan ke saya
4. Membuat media kampanye yang berisi foto dan slogan saya sebagai Calon Kepala desa.

Pengalaman menapak ruang politik itu memberikan pembelajaran berharga bagi Ibu Murni meski pun belum berkesempatan untuk menjadi Kades Desa Mandah pada pemilihan di bulan Juli 2015 lalu.¢ **(Ana Yunita Pratiwi, Staf Lapang DAMAR).**

Peduli Sesama Remaja

"Siapa bilang remaja yang mengalami hamil di luar nikah tidak mempunyai masa depan lagi?. Menurut saya seorang remaja yang mengalami hamil di luar nikah mereka masih mempunyai hak untuk menentukan hidupnya lebih baik lagi, kita tidak boleh memberi pandangan bahwa kejadian yang mereka alami merupakan akhir dari kehidupannya. Mereka adalah korban kekerasan seksual sehingga kita perlu memberi penguatan serta perlindungan kepada korban".

Kalimat itulah yang disampaikan oleh Dwi Fadillah pada saat ia mendengar sekelompok remaja yang sedang berdiskusi di salah satu lokasi wisata Kota Bengkulu. Topik pembahasan diskusi tersebut adalah tentang remaja yang hamil di luar nikah dan salah satu remaja melontarkan kalimat "remaja yang sudah hamil di luar nikah itu berarti hidupnya sudah hancur tidak memiliki masa depan lagi". Dengan segera Dwi berupaya memberikan penyadaran kepada teman-temannya agar lebih mengetahui tentang kesehatan reproduksi dengan cara mengobrol ringan dan memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.



(Continued from page 15)

Pengetahuan ini didapatkan oleh Dwi sejak bergabung dalam kelompok perempuan muda di Kelurahan Pondok Besi. Di kelompok tersebut ia dikenalkan tentang Program MAMPU, mendapatkan penguatan tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dalam bentuk diskusi, pertemuan berkala, maupun pelatihan. Pengetahuan yang didapatkan oleh Dwi telah merubah cara pandangnya tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan dampak pacaran yang tidak sehat.

Sebagaimana layaknya seorang perempuan remaja Dwi mengetahui bahwa sekarang banyak pengaruh yang tidak baik dalam pergaulan jika kita salah memilih teman. Tidak bisa dipungkiri dengan kemajuan teknologi mendorong juga perubahan gaya hidup pada remaja yang sangat muda dipengaruhi oleh lingkungan. Cerita ini juga dilihat dari kehidupan teman-teman yang sebaya di mana mereka melakukan pacaran yang tidak sehat, mungkin saja risikonya akan terjadi kehamilan tidak diinginkan. Namun sekarang, dia telah menyadari akan risiko tersebut.

Sejak mengikuti kegiatan bersama anggota kelompoknya sekarang dia merasa pengetahuan tentang HKSR semakin bertambah. Ilmu yang Dwi dapatkan tidak hanya diterapkan dalam kehidupannya saja melainkan juga dibagikan dengan teman-teman lingkungannya. Ia menjadi tempat mengadu temannya dan memberikan solusi sesuai dengan hasil pelatihan yang ia dapatkan. **(Widya Lestri, Staf Lapang Cahaya Perempuan WCC)**

Proses Belajar Sepanjang Hidup

''Bahwa belajar tidak mesti duduk dibangku sekolah tetapi belajar bisa kita dapat dimana saja dengan siapa saja asal ada kemauan dari dalam diri"

Melli Minarni, adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 31 tahun dan memiliki 2 orang anak. Ia memperoleh penghasilan dengan membuka warung manisan yang menjual makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari. Ia aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang ada di lingkungan tempat tinggalnya.

Pada awal tahun 2015, ibu Melli mendapat informasi dari Ketua RT 5 dan staf lapang Cahaya Perempuan WCC mengenai pembentukan kelompok untuk Program MAMPU dia berminat bergabung di kelompok perempuan dewasa ini. Setelah beberapa waktu bergabung dia mendapatkan penguatan-penguatan baik itu dalam bentuk diskusi, pertemuan berkala maupun pelatihan-pelatihan.Program ini bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan perempuan untuk kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi pada perempuan miskin di perkotaan. Peningkatan pengetahuan didapatkan melalui kegiatan yang difasilitasi oleh Cahaya Perempuan WCC. Program ini menjangkau perempuan miskin yang tergabung dalam kelompok dan harus terlibat aktif sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan program agar tercapai tujuan program.

Sejak mengikuti kegiatan bersama anggota kelompoknya sekarang dia merasa pengetahuan tentang hak kesehatan seksual reproduksi dan kesetaraan gender semakin bertambah. Ia mengetahui bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah salah satunya adalah masalah kesetaraan gender antara suami dan istri. Pada umumnya masyarakat mempunyai pandangan bahwa seorang suami hanya bertugas dalam mencari nafkah keluarga dan seorang istri mengurus rumah tangga, mengurus anak dan istri sebagai pencari nafkah tambahan. Tetapi sebenarnya istri juga bisa menjadi pencari nafkah utama.



Pelatihan Manajemen buat dampingan PESADA di PUSDIPRA—Sidikalang

Ilmu yang dia dapatkan tidak hanya diterapkan dalam kehidupannya saja melainkan juga dibagikan dengan teman-teman lingkungannya.Pada awalnya suaminya tidak bisa menerima penyataan ibu Melli yang dianggap merupakan ketidakwajaran dilakukan oleh seorang istri dan merupakan bentuk perlawanan, ibu Melli pun menjelaskan dengan baik bahwa dalam berumah tangga diperlukan kerjasama yang baik antar istri dan suami. Seperti halnya mengurus rumah tangga, mengurus anak itu juga merupakan tanggungjawab seorang suami sehingga tidak semua beban di berikan kepada istri semata. Sekarang suaminya sudah bisa memahami hal tersebut setelah mendapat penjelasan dari istrinya sesuai

dengan hasil pelatihan yang dia ikuti namun apabila ada yang hal belum diketahui maka akan dibicarakan bersama dalam kegiatan pertemuan berkala ataupun diskusi kritis berseri kelompok.

Pembelajaran Baru

"Dulu saya malu untuk bicara alat reproduksi kepada orang lain, keluarga apalagi kepada anak-anak, itu barang tidak baik [saru] dan memalukan. Saya juga tidak bisa membedakan kodrat antara perempuan dan laki laki. Misalnya mengenai mencari nafkah. Saya mendengar dari masyarakat bahwa itu adalah kodrat laki-laki dan di dapur perempuan. Tetapi sebenarnya tidak demikian"

Dengan semangat Ibu Erna (35 tahun Ibu Rumah Tangga) bercerita mengenai perubahan yang dirasakannya setelah mendapatkan pengetahuan dari diskusi yang dilakukan oleh APM (Aliansi Perempuan Merangin) pada dampingan mereka anggota kelompok CC (*Comunity Center*). Walaupun telah menjadi kader Posyandu, Ibu Erna merasa tidak tahu mengenai hak kesehatan reproduksi apalagi gender dankodrat. Tetapi



Pelatihan HKSR untuk remaja—APM Jambi

setelah mendapatkan pendidikan, ia mulai mengetahui alat reproduksi dan hak – haknya.

Ibu Erna melihat bahwa proses diskusi dan pembelajaran mengenai kesehatan seksual dan reproduksi di CC Lentera Hati (Desa Mampun Baru) dilakukan secara terus menerus. Hal ini semakin membuka pemikiran ibu Erna karena di lingkungannya banyak terjadi pernikahan anak. Ia berani berbicara dan mengajak teman-teman kader lainnya untuk memberikan informasi yang benar terkait HKSR kepada masyarakat.

Ia berharap suatu saat nanti ia dapat menjadi fasilitator yang bisa memberikan informasi pada masyarakat terkait isu reproduksi. Ia juga berharap isu reproduksi ini dapat diberikan kepada anak sekolah mengingat karena banyaknya kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam pacaran yang dialami oleh siswa di sekolah.

Aku dan Hak ku Sebagai Perempuan

LS itulah inisial nama perempuan tangguh yang memiliki jiwa muda. Buk " L" saya biasa memanggilnya. Perempuan berumur 46 tahun ini termasuk salah satu perempuan dampingan Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) yang tinggal di Jl. Manunggal Kel.Batu gadang Kec. Lubuk Kilangan. Buk L telah menikah selama 26 tahun, memiliki 2 anak laki-laki . Anak pertama berumur 25 tahun dan yang kedua berumur 22 tahun.

Kegiatan sehari-hari buk " L" adalah membuat produk olahan kerupuk bawang salendri dan kacang balado. Buk "L " terlibat aktif dalam usaha produk olahannya dari mulai membeli bahan, memproduksi hingga memasarkkan produknya. Bercerita berdua adalah hal yang sering saya lakukan dengan beliau. Berawal dari sebuah Lokakarya Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dan Gender buk L semakin sadar akan hak sebagai seorang perempuan.

Ceria, selalu bersemangat, dan pantang menyerah adalah sikap buk "L" yang saya paling senangi. Buk "L" yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya, sore hari setelah pelatihan selalu datang ke ruangan saya dan termenung. Kami saling berbagi pengalaman mengenai materi pelatihan yang di dapatkan.

Seminggu setelah pelatihan beliau datang ke kantor dan menemui saya di saung ruangan santai di kantor . Betapa terkejutnya saya ketika beliau meneteskan air mata dan merangkul saya dengan erat. Saya bertanya, Ibu kenapa ? Perlahan dia mulai melepaskan rangkulannya sambil mengusap air matanya. Buk "L" dengan terisak mencerikan kondisi keluarganya. Saya sudah tidak sanggup lagi menjadi perempuan yang tertekan, di perlakukan semaunya oleh suami saya. Saya sudah tidak tahan lagi.

Pada saat itu saya kaget namun tetap berusaha tenang dan menjaga kenyamanan beliau. Memberikan waktu untuk beliau bercerita. Buk "L" berkata " Jujur baru pertama kali ini saya bercerita kepada orang lain tentang masalah keluarga saya, jangankan orang lain hal ini selalu saya sembunyikan dari keluarga yang terdekat mengenai perlakuan suami saya.

Kesadaran itu muncul setelah mengikuti pelatihan HKSR dan Gender. Kamu adalah orang yang saya percaya.

"Suami yang begitu saya sayangi tidak pernah memahami saya. Sudah 26 tahun kami berumah tangga tak pernah dia mau bertanya apa yang saya rasakan sebagai seorang istri dan pencari nafkah untuk keluarga. Suami saya bekerja namun dia hanya memikirkan kebutuhannya. Sudah hampir 3 bulan dia pergi, ini bukan pertama kali dia pergi keluar negeri untuk bekerja. Kami di tinggal begitu saja tanpa menanyakan apakah kami punya uang untuk makan atau tidak selama dia tinggalkan. Rumah tangga yang kami bangun rasanya tidak lagi membuat saya mampu bertahan" kata buk "L"

Tidak memberi nafkah lahir dan bathin, menghina usaha produksi olahan sebagai suatu usaha yang tidak layak, dan dia tidak memberikan perhatian apapun." Pada sisi ini saya merasa sangat tertekan, meminta bantuannya untuk mengantarkan produk yang sudah saya buat namun dia berkata urus saja sendiri usaha ini tidak terlalu penting".



Pedalaman Isu HKSR—LP2M Padang

Saya lalu pergi mengantar produk dan di tengah hujan deras saya menangis dan selalu melihat telepon gengam apakah dia menanyakan kabar saya atau tidak. Hingga saya pulang larut malam setelah mendistribusikan produk saya ke toko makanan. Saya pulang dan melihat dia sedang menonton televisi dalam keadaan saya basah kuyuppun dia tidak bertanya keadaan saya. Hal ini sering saya alami namun tidak pernah dia mau memperbaiki sikapnya.

Kekerasan psikis yang sudah lama alami buk "L" tidak dapat ditahan lagi. Beliau tersadar bahwa selama ini harusnya menggunakan hak sebagai perempuan yang bisa mengambil keputusan. Keputusan dimana beliau bisa merasakan ketenangan. Seketika beliau berfikir harus sampai kapan merasakan ketidakberdayaan ini. Tampak luar memiliki seorang suami, namun dalam rumah tangga buk "L" merasa suami yang seharusnya menjadi pengayom, pelindung dan menafkahi keluarga itu tidak ada.

Keputusan yang diambil buk "L" adalah mencoba menenangkan diri. Memicarakan perasaan yang dirasakan bahwa beliau tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengannya memutuskan berpindah rumah. Suaminya diam dan tidak berkata apapun, merasa tidak bersalah sedikitpun. Saat ini buk "L" tinggal seorang diri dan selalu berkomunikasi dengan kedua anak saya. Merasakan lebih bebas , mandiri, dan tenang tanpa tekanan bathin.

Hal ini tidak mudah, keputusan yang ambil buk "L" mendapatkan gunjingan warga, dan keluarga suami marah terhadap keputusannya. Buk "L" berkata: "Selama ini berusaha untuk menutupi segala rasa tertekan, yang menjalani hubungan ini saya, yang hidup penuh tekanan adalah saya. Saya harus bisa mengambil keputusan ini ".
Pesan buk "L" adalah perempuan itu harus berani mengambil keputusan, bukan saatnya lagi perempuan harus diam tak berdaya tertekan. Perempuan harus memiliki harga diri, lebih paham akan hak sebagai perempuan dan lebih kritis, serta keputusan yang akan diambil. ***(Ditulis oleh Ayu Sriwahyuni, Staf Lapang Program MAMPU wilayah Kota Padang)***

Permampu Dalam Berita

Aspirasi Perempuan Desa Melalui Lentera Perempuan

Media cetak bernama Lentera Perempuan terlihat di seluruh penjuru desa. Media ini adalah hasil karya tangan belasan perempuan muda di desa Sumber Urip, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Akses informasi ataupun bahan bacaan yang terbatas, mendorong perempuan yang kesehariannya bekerja sebagai buruh tani di kaki Bukit Kaba ini untuk membuat media sendiri. Media ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan dan tantangan yang dihadapi perempuan dan warga desa. Selengkapnya di: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/626625-perjuangkan-hak--desa-ini-lahirkan-media-khusus-perempuan

488 Calon Ibu di Lampung Meninggal Dunia

Gerakan Perempuan Lampung (GPL) merilis bahwa dalam tiga tahun terakhir 488 perempuan Lampung meninggal dunia karena mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi, layanan, dan pengetahuan perempuan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Melalui seminar "Percepatan Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Sebagai Hak Azasi Manusia", GPL memberikan pemahaman kepada peserta tentang pentingnya reproduksi perempuan. Selengkapnya di: http://lampung.tribunnews.com/2015/06/07/hamil-tak-diinginkan-488-calon-ibu-di-lampung-meninggal-duniadanhttp://lampost.co/berita/kurang-informasi-penyebab-kematian-ibu-dan-anak

Pelajar Rentan Alami Kekerasan Seksual

Angka kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan. Di sepanjang tahun 2014 WCC Palembang mendampingi 111 kasus kekerasan seksual pemerkosaan dan pelecahan. WCC Palembang menyoroti bahwa pengaruh gadget, media informasi internet, maupun tontonan yang tidak relevan untuk ditonton berkontribusi terhadap hal ini. Maka dari itu, harus ada upaya untuk membentengi diri pada anak agar dia paham mana yang harus ia lakukan dan mana yang harus dia hindari. Selengkapnya di: http://beritapagi.co.id/2015/06/17/pelajar-rentan-alami-kekerasan-seksual.html; http://palembang.tribunnews.com/2015/01/21/kasus-kekerasan-seksual-di-sumsel-didominasi-pelajar-dan-mahasiswi

Perlakuan Diskriminatif Oleh Aparat Penegak Hukum

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pasangannya tetapi juga dari aparat penegak hukum. Hal tersebut disampaikan oleh pendamping korban KDRT Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA). Banyak pertanyaan polisi yang arahnya menyalahkan dan menyudutkan perempuan. Oleh sebab itu, para korban harus didampingi saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ataupun dalam proses hukum lainnya. Selengkapnya di: www.cnnindonesia.com/.../korban-kdrt-kerap-alami-diskriminasi-oleh-penegak-hukum

Bengkulu Darurat Inses

Cahaya Perempuan WCC merilis data kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak sejak 2011 hingga 2013. Tercatat 238 kasusyang didampingi, dengan sebaran datakekerasan seksual dalam pacaran 42%, inses 31%, perkosaan 20%, dan trafiking untuk tujuan seksual 7%. Tentu saja ini fenomena gunung es, dimana kasus yang tidak terlihat jauh lebih banyak lagi. Keterangan Menteri Sosial Khofifah Indar Prawansa dalam seminar di Pusat Studi Jepang - Universitas Indonesia belum lama ini, menyatakan Bengkulu berada di tingkat pertama nasional korban inses. Oleh karena itu Bengkulu harus dinyatakan darurat inses. Selengkapnya di: http://kupasbengkulu.com/bengkulu-darurat-inses/

Pertemuan Lintas Sektor di Aceh Utara

Flower Aceh melakukan pertemuan lintas sektor dalam rangka mensosialisasikan program Perempuan Sumatera Mampu (PERMAMPU) di Kabupaten Aceh Utara. Pertemuan yang berlangsung di oproom Bappeda Aceh Utara dihadiri oleh para pemangku kebijakan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Camat, Dinas Kesehatan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (BPMKS), Badan Kesbangpol Linmas, Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia, Kepala Puskesmas, Jari Aceh, dan Balai Syura Aceh Utara. Melalui kegiatan ini diharapkan adanya sinergis semua *stakeholders* dalam program yang memperjuangan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi.

Selengkapnya di: http://www.lintasnasional.com/2015/06/09/flower-aceh-lakukan-pertemuan-lintas-sektor-di-aceh-utara/

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Meningkat

(Continued on page 20)

(Continued from page 19)

Berdasarkan catatan Women Crisis Center (WCC) PESADA, jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan semakin meningkat. Dalam tiga tahun terakhir, WCC Sinceritas – PESADA memperhatikan bahwa terdapat 100 perempuan yang ditangani langsung per tahun. Tetapi pada akhir 2014 ini, jumlah korban yang ditangani melonjak ke angka 168. Angka tertinggi adalah 84 korban KDRT (50%) lalu disusul kekerasan seksual 43 kasus (26%). Korban yang ditangani sebagian besar berasal dari wilayah Dairi dan Pakpak Bharat yaitu 70 kasus (42%), dan wilayah Medan sekitarnya 45 kasus (27%). Selebihnya adalah dari Nias, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Tengah. Selengkapnya di: http://www.koran-sindo.com/read/940989/151/kdrt-tinggi-cuti-melahirkan-sedikit-1419306365

Nikah Dini "Tren" di Bukit Kemuning

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional dan Perlindungan Perempuan (BKKBN & PP) Lampung Utara (Lampura) pada tahun 2014 mencatat terdapat 5.675 warga yang menikah di bawah usia 20 tahun alias pernikahan dini. Selengkapnya di: http://lampung.tribunnews.com/2015/05/01/tahun-lalu-5675-pasangan-di-lampura-menikah-muda